

ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BULUNGAN 2019-2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BULUNGAN**

ANALISIS
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BULUNGAN
2019-2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BULUNGAN

KATA PENGANTAR

Publikasi **Analisis Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023** ini mempunyai arti penting bagi pembangunan daerah khususnya pembangunan di bidang ekonomi, hal tersebut dikarenakan data yang disajikan memuat informasi mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan regional per kapita masyarakat serta struktur ekonomi daerah.

Penerbitan buku ini pada hakekatnya merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas mengenai gambaran tentang data ekonomi makro sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah. Semua gambaran yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan khususnya dalam mendukung kegiatan perencanaan, evaluasi kebijakan, maupun dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah ke depan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan dari semua pihak guna perbaikan buku selanjutnya.

Terbitnya publikasi Analisis Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023 tidak lepas dari kerja sama dan bantuan berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan kerjasama yang baik selama ini.

Tanjung Selor, September 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Bulungan



Ir. Iwan Sugiyanta, ST., MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Metodologi Perhitungan PDRB.....	5
1.4 Gambaran Umum Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Bulungan.....	9
BAB II RUANG LINGKUP PDRB PENDEKATAN PRODUKSI.....	11
2.1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.....	13
2.2 Pertambangan dan Penggalian.....	13
2.3 Industri Pengolahan.....	13
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas.....	13
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.....	14
2.6 Konstruksi.....	14
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14
2.8 Transportasi dan Pergudangan.....	15
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	15
2.10 Informasi dan Komunikasi.....	15
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi.....	15
2.12 Real Estat.....	16
2.13 Jasa Perusahaan.....	16
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	16
2.15 Jasa Pendidikan.....	16
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	17
2.17 Jasa Lainnya.....	17
BAB III RUANG LINGKUP PDRB PENDEKATAN PENGELUARAN.....	19
3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT).....	21
3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).....	22

3.3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P).....	23
3.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	23
3.5	Perubahan Inventori.....	23
3.6	Ekspor-Impor.....	24
BAB IV	TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BULUNGAN PENDEKATAN PRODUKSI 2019-2023.....	25
4.1	PDRB Kabupaten Bulungan.....	27
4.2	Struktur Perekonomian Kabupaten Bulungan.....	28
4.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	31
4.4	PDRB per Kapita.....	33
4.5	Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.....	34
4.6	Analisis Tipologi Klassen.....	36
BAB V	TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BULUNGAN PENDEKATAN PENGELUARAN 2019-2023.....	39
5.1	Struktur Perekonomian Kabupaten Bulungan.....	41
5.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	42
5.3	Analisis ICOR.....	44
BAB VI	TINJAUAN KHUSUS FENOMENA PENDUKUNG.....	47
6.1	Gambaran Umum Usaha.....	49
6.2	Kondisi Perekonomian Usaha.....	50
6.3	Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha.....	55
BAB VII	PENUTUP.....	59
7.1	Kesimpulan.....	61
7.2	Saran.....	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Piramida Penduduk Kabupaten Bulungan, 2023.....	10
Gambar 4.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (triliun rupiah).....	27
Gambar 4.2	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulungan, 2019 dan 2023 (persen).....	28
Gambar 4.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulungan Menurut Kelompok Sektor, 2019-2023 (persen).....	30
Gambar 4.4	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (juta rupiah).....	34
Gambar 4.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara, 2023 (triliun rupiah).....	35
Gambar 4.6	Kuadran Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2019-2023.....	37
Gambar 6.1	Gambaran Umum Kategori Usaha Sampel Tahun 2023.....	49
Gambar 6.2	Perkembangan Omset Usaha Sampel Tahun 2023.....	50
Gambar 6.3	Perkembangan Rata-Rata Jam Kerja Usaha Sampel Tahun 2023.....	51
Gambar 6.4	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Usaha Sampel Tahun 2023.....	52
Gambar 6.5	Perkembangan Harga Barang Input/Bahan Baku Usaha Sampel Tahun 2023.....	53
Gambar 6.6	Perspektif Responden terhadap Perekonomian Secara Umum Tahun 2023.....	54
Gambar 6.7	Prospek Perkembangan Usaha Sampel Tahun 2024.....	55
Gambar 6.8	Faktor Utama Penurunan Omset Usaha Sampel Tahun 2023.....	56
Gambar 6.9	Faktor Utama Peningkatan Omset Usaha Sampel Tahun 2023.....	57
Gambar 6.10	Kendala yang Dialami Usaha Sampel Tahun 2023.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk, Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Bulungan, 2023.....	9
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (persen).....	32
Tabel 5.1	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (persen).....	41
Tabel 5.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (persen).....	42
Tabel 5.3	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Bulungan, 2019-2023.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023.....	65
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023.....	67
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023.....	69
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023.....	70
Lampiran 5	Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023.....	71
Lampiran 6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023.....	72
Lampiran 7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023.....	74
Lampiran 8	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023...	76
Lampiran 9	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023.....	77
Lampiran 10	Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional perlu adanya sinergi yang dilakukan pada pembangunan ekonomi di daerah. Proses pembangunan ekonomi itu sendiri tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata antar daerah tersebut.

Dalam rangka membangun daerah agar lebih maju maka pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, walaupun banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran dan kemampuan mengelola sumber daya yang dapat digunakan. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya yang merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama untuk memacu laju pembangunan di suatu daerah.

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis setiap sektor di dalam memacu menjadi pendorong utama (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda. Dalam dimensi ekonomi pada jaman dahulu indikator keberhasilan ekonomi selalu saja berorientasi pada keberhasilan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah lebih mengarah kepada kegiatan produksi. Namun saat ini, orientasi pembangunan yang berbasis pada produksi juga perlu diimbangi dengan penyerapan realisasi yang telah dilakukan di sisi konsumsi, karena seringkali keberhasilan pembangunan dengan indikator produksi saja tidak dinikmati oleh penduduk secara keseluruhan.

Pembangunan di negara-negara berkembang saat ini lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi. Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor. Perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang

dimiliki oleh suatu daerah. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi dengan melihat struktur ekonomi daerah secara menyeluruh.

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dikatakan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berlatar belakang terhadap sektor-sektor pembangunan daerah khususnya sektor basis yang mana dapat meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri.

Data PDRB sering digunakan dan berkorelasi positif dengan standar hidup suatu masyarakat. Namun data PDRB pada dasarnya adalah ukuran kinerja/aktivitas ekonomi di suatu wilayah dan bukan ukuran yang tepat untuk mengukur standar hidup atau kesejahteraan suatu masyarakat. Sehingga, saat ini ukuran PDRB sebagai ukuran standar hidup banyak dikritik sehingga banyak negara secara aktif melakukan langkah-langkah alternatif untuk meningkatkan data PDRB yang lebih akomodatif dalam mengukur standar hidup suatu masyarakat. Penggunaan series data PDRB yang konsisten dan panjang juga merupakan informasi yang sangat diperlukan khususnya bagi pemerintah dan pengguna data lainnya sehingga konsistensi data PDRB.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian secara umum yang ada di Kabupaten Bulungan dan secara khusus melalui analisis terhadap data PDRB dan indikator-indikator turunannya melalui dua sisi pendekatan yaitu pendekatan produksi dan pengeluaran selama periode 2019-2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan publikasi ini adalah tersedianya bahan kajian ekonomi secara sektoral pada tingkat regional guna melihat sejauh mana capaian hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada dua sisi pendekatan yaitu produksi maupun pengeluaran/konsumsi, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dan sebagai bahan perencanaan yang akan dilakukan dalam membangun daerahnya secara lebih konkrit.

1.3 Metodologi Perhitungan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran output ekonomi dalam melihat kinerja perekonomian suatu negara/wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB diukur berdasarkan nilai/harga pasar dari seluruh barang dan jasa yang tercipta/diproduksi dan dilakukan dalam batas-batas suatu negara/wilayah tanpa memperhatikan faktor-faktor produksi tersebut apakah milik penduduk/residen atau non-residen dalam periode waktu tertentu (pada umumnya setiap tahun). Pengukuran PDRB mengacu pada Sistem Neraca Nasional atau *System of National Accounts* (SNA) Tahun 2008 yang standar dan berlaku secara internasional. SNA disusun secara umum mencakup semua transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan, pemerintah serta luar negeri) dicatat secara konsisten dan sistematis dengan aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah disepakati bersama untuk kepentingan semua negara di dunia. Namun demikian, dalam implementasi di beberapa negara, SNA dimodifikasi sesuai dengan ketersediaan data dan sistem perstatistikan di masing-masing negara.

Pendekatan Perhitungan PDRB

Pada dasarnya PDRB dapat dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penghitungan yaitu: pendekatan produksi/*production approach* (PDRB-P), pendekatan pengeluaran/*expenditure approach* (PDRB-E) dan pendekatan pendapatan/*income approach* (PDRB-I). Secara teoritis, ketiga pendekatan dalam mengukur PDRB tersebut akan menghasilkan nilai/*value* yang sama. Namun demikian, pada prakteknya penghitungan PDRB dengan menggunakan masing-masing cara dari ketiga pendekatan dapat saja menghasilkan nilai yang berbeda. Hal ini mungkin terjadi karena ketiga pendekatan dalam menghitung PDRB tersebut menggunakan sumber data dan metode penghitungan yang berbeda sehingga terjadinya diskrepansi statistik tidak dapat dihindarkan. Penjelasan lebih rinci terkait tiga pendekatan dalam penghitungan PDRB dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendekatan Produksi

Pada pendekatan ini PDRB didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi, dimana nilai tambah diperoleh dari output dikurangi konsumsi antara. Seluruh unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha yaitu: (A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri Pengolahan, (D) Pengadaan Listrik dan Gas, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (F)

Konstruksi, (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan Pergudangan, (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (J) Informasi dan Komunikasi, (K) Jasa Keuangan dan Asuransi, (L) Real Estat, (M,N) Jasa Perusahaan, (O) Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (P) Jasa Pendidikan, (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (R,S,T,U) Jasa lainnya.

Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan ini, PDRB meliputi semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT, (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (5) Perubahan Inventori, dan (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor).

Pendekatan Pendapatan

Penghitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan adalah total pendapatan yang diterima oleh semua pelaku/sector ekonomi dalam suatu negara sebagai penggunaan faktor produksi dalam melakukan aktivitas ekonominya. Pada pendekatan ini, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dengan kata lain, PDRB merupakan penjumlahan kompensasi pekerja, surplus usaha bruto, pendapatan campuran bruto, dan pajak dikurangi subsidi atas produksi dan impor. Semua pendapatan berasal dari produksi barang maupun jasa, maka pendapatan domestik bruto suatu negara/wilayah seyogianya harus sama dengan produk domestik bruto yang dihitung melalui pendekatan produksi maupun pengeluaran.

Pergerakan aktifitas perekonomian dari tahun ke tahun ditentukan oleh 3 hal yang dalam perekonomian makro saling berkaitan satu dengan lainnya; yaitu: Produksi, Pendapatan dan Permintaan. Interaksi ketiganya dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Perubahan permintaan untuk barang menyebabkan perubahan produksi
- b. Perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan
- c. Perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang

Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran saat ini sudah dilakukan, sementara penghitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan pada level provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan khususnya

belum sepenuhnya dapat dilakukan karena adanya keterbatasan data. Secara umum komponen-komponen pembentuk PDRB dengan pendekatan produksi adalah:

a. Output (Nilai Produksi)

Output adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

b. Konsumsi Antara

Konsumsi antara adalah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sebagai input dalam proses produksi atau nilai barang dan jasa tidak tahan lama yang digunakan/habis dalam proses produksi.

c. Nilai Tambah Bruto (NTB)

Nilai Tambah Bruto adalah selisih antara output dan konsumsi antara, yang merupakan produk dari proses produksi. Produk ini terdiri atas:

1. Pendapatan faktor yang terdiri dari :
 - Kompensasi tenaga kerja
 - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah
 - Bunga sebagai jasa modal, dan
 - Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswasta
2. Konsumsi barang modal tetap yang dipakai untuk produksi
3. Pajak lainnya atas produksi dikurangi subsidi

Penggunaan NTB dalam menghitung aktivitas ekonomi suatu sektor (PDRB) dan tidak menghitung menggunakan output adalah untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda (double counting) karena di dalam output suatu sektor dapat mengandung output sektor lain sebagai biaya antara dalam suatu proses produksi. Misalnya output sektor pertanian (padi) digunakan sebagai bahan baku sektor industri pengolahan untuk menghasilkan beras. Sehingga apabila digunakan nilai output dalam mengukur aktivitas ekonomi maka terlihat bahwa output sektor pertanian dihitung disektor pertanian dan di sektor industri pengolahan sebagai bahan baku (biaya/input antara).

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena penghitungan dilakukan dengan menggunakan harga pada tahun berjalan yang berlaku pada saat itu, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga pada satu tahun tertentu yang dijadikan dasar. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar dalam penilaian harga konstan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Bila dilihat menurut jenis pendekatannya, pada dasarnya ada tiga cara dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku yaitu:

- a. Menurut Pendekatan Produksi yaitu Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi konsumsi antara dari masing-masing total nilai produksi/pendapatan (output) tiap-tiap lapangan usaha.
- b. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB diperoleh dengan penjumlahan semua komponen permintaan akhir. $PDRB = \text{Konsumsi rumah tangga} + \text{Konsumsi Pemerintah} + \text{PMTB} + \text{Perubahan Stok} + (\text{Ekspor} - \text{Impor})$.
- c. Menurut Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. $PDRB = \text{Kompensasi Tenaga Kerja} + \text{Surplus Usaha Neto} + \text{Konsumsi Barang Modal Tetap} + \text{Pajak} - \text{Subsidi atas Produksi dan Impor}$

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Pada dasarnya ada tiga metode dasar dalam menghitung PDRB atas dasar harga konstan yaitu:

- a. Revaluasi: perkalian antara kuantum/kuantitas produksi tahun yang berjalan dengan harga pada tahun dasar.
- b. Deflasi: dengan cara membagi nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks harga dibagi 100. (nilai atas dasar harga berlaku dibagi dengan indeks harga yang sesuai)
- c. Ekstrapolasi: dengan cara mengalikan nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum dibagi 100. (harga atas tahun dasar dikalikan dengan indeks volume/kuantitas yang sesuai).

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan ini yang biasanya lebih lanjut disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

1.4 Gambaran Umum Kondisi Georafis dan Demografi Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan terletak antara 2°09'19" - 3°34'49" pada garis Lintang Utara dan 116°04'41" – 117°57'56" pada Bujur Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 12.984,41 km². Hal ini menempatkan Kabupaten Bulungan sebagai wilayah dengan terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Secara administratif, Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 kecamatan serta 81 desa/kelurahan.

Adapun batas wilayah Kabupaten Bulungan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

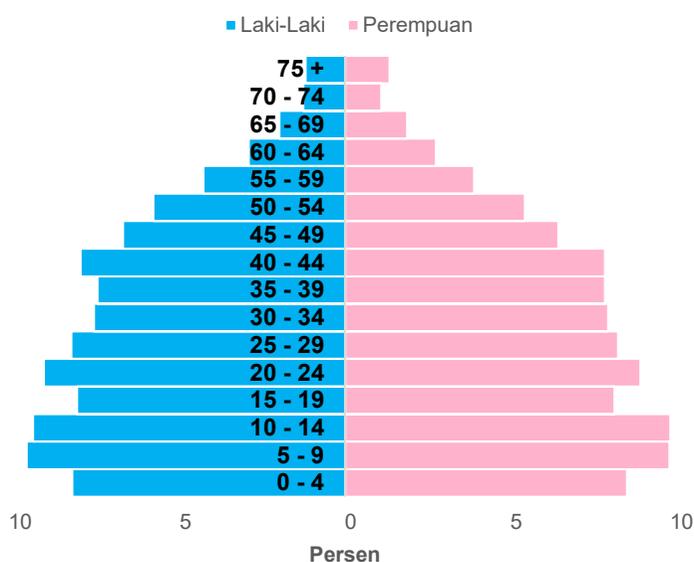
Banyak ahli yang mengatakan bahwa penduduk bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tapi sekaligus sebagai subjek dari pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan data dan informasi kependudukan untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan dan untuk perencanaan pembangunan. Hubungan antara luas wilayah di suatu wilayah dengan jumlah penduduk dapat dilihat melalui kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menggambarkan banyaknya penduduk (jiwa) yang berada pada suatu wilayah tiap satu km².

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Bulungan, 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk (persen)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Peso	4.294	2,59	1	107,9
Peso Hilir	4.185	2,52	3	109,5
Tanjung Palas Barat	6.922	4,18	7	107,0
Tanjung Palas	18.533	11,18	11	111,0
Tanjung Selor	63.588	38,36	94	113,7
Tanjung Palas Timur	20.169	12,17	16	111,9
Tanjung Palas Tengah	12.439	7,50	20	106,4
Tanjung Palas Utara	11.726	7,07	15	106,2
Sekatak	11.961	7,22	6	113,4
Bunyu	11.958	7,21	60	116,1
Bulungan	165.775	100,00	13	118,7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan

Secara umum jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Bulungan relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari besaran rasio jenis kelamin pada tahun 2023 mencapai 118,7. Artinya, pada tahun 2023 dari setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Bulungan terdapat sekitar 118-119 penduduk laki-laki. Selain itu, pada tahun 2023 dapat diketahui komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Bulungan mencapai 67,91 persen, sedangkan sisanya sebesar 32,09 persen merupakan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jumlah yang besar pada usia produktif ini merupakan asset pembangunan yang sangat berpotensi jika di kelola dengan baik.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Bulungan, 2023

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2023 mencapai 47,25 persen diperoleh dari pembagian antara jumlah penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif dikali 100 persen. Rasio ini menyatakan jumlah penduduk non produktif yang menjadi “beban” atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif, semakin besar nilai rasio ini maka menunjukkan semakin besar beban yang harus di tanggung oleh kelompok usia produktif. Penduduk usia 0-4 tahun memiliki porsi yang lebih rendah dari usia 5-9 tahun, hal ini merupakan salah satu sinyal angka kelahiran yang relatif menurun. Dilihat dari strukturnya, penduduk Kabupaten Bulungan didominasi penduduk usia muda.

BAB II

RUANG LINGKUP PDRB PENDEKATAN PRODUKSI

BAB II

RUANG LINGKUP PDRB PENDEKATAN PRODUKSI

Dalam bab ini membahas ruang lingkup serta definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi dari masing-masing kategori lapangan usaha.

2.1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Termasuk juga kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.2 Pertambangan dan Penggalan

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan mencakup empat subkategori utama, yaitu: Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (migas), Pertambangan Batubara dan Lignit, Pertambangan Bijih Logam serta Pertambangan dan Penggalan Lainnya.

2.3 Industri Pengolahan

Lapangan Usaha Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalan serta produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Termasuk Lapangan Usaha Industri Pengolahan adalah aktivitas yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Lapangan usaha industri pengolahan terbagi atas dua lapangan usaha utama, yaitu Industri Batubara dan Pengilangan Migas serta Industri Pengolahan Non Migas.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan,

saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas, dan mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/ lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Kegiatan pengadaan air termasuk dalam kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi mencakup kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.

Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/ lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, pergudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.

Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.

Lapangan Usaha ini terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan holding dan kegiatan lembaga penjaminan atau pendanaan serta lembaga keuangan sejenis.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat, penyediaan jasa real estat lainnya seperti jasa penaksir real estat. Kegiatan dikategori ini bisa dilakukan pada real estat atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan biasa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Kategori ini juga mencakup real estat yang dimiliki sendiri dan ditempati sendiri (*owner occupied dwelling*) serta kegiatan mengelola bangunan real estat

2.13 Jasa Perusahaan

Lapangan Usaha Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni Kategori M dan Kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori ini antara lain jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis. Kategori ini juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan, dan penunjang

pendidikan. Lapangan usaha ini mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain (termasuk pendidikan nonformal), juga mencakup jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit sampai dengan kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); dan Jasa Kegiatan Sosial (panti wreda, panti asuhan, panti rehabilitasi, dan lain-lain).

2.17 Jasa Lainnya

Lapangan Usaha Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

BAB III

RUANG LINGKUP PDRB PENDEKATAN PENGELUARAN

BAB III

RUANG LINGKUP PDRB PENDEKATAN PENGELUARAN

Produk domestik regional bruto selain dihitung dari sisi produksi atau lapangan usaha dapat pula dihitung dari sisi penggunaan atau pendekatan pengeluaran. Dengan perhitungan dari sisi yang berbeda hasil dari perhitungan tersebut adalah sama, namun dengan dilakukannya perhitungan dengan pendekatan sisi penggunaan akan diperoleh data mengenai komposisi/penyerapan penggunaan dari seluruh nilai disuatu wilayah. Menurut pendekatan penggunaan PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran akhir konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal, mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaannya, serta mengonsumsi barang dan jasa secara kolektif, utamanya makanan dan perumahan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Konsep residen yang dimaksud adalah dimana anggota rumah tangga menetap/berniat menetap lebih dari satu tahun dan dimana aktivitas ekonomi utamanya berada.

Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencakup:

- Nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian;
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter.
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja; dan
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri.

Sementara itu, konsumsi akhir rumah tangga tidak mencakup:

- Pengeluaran untuk mengadakan aset tetap dan barang-barang berharga;
- Pengeluaran untuk Usaha Rumah Tangga (URT);
- Perbaikan besar tempat tinggal, seperti rekonstruksi, renovasi, dan sebagainya.

- Pembayaran pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- Pembayaran kredit, premi asuransi, dan dana pensiun; serta
- Barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja untuk kegiatan operasional usaha dan bukan bagian dari kompensasi tenaga kerja.

PK-RT dicatat secara *accrual basis*. Konsumsi barang dicatat pada saat terjadi perubahan kepemilikan, sedangkan konsumsi jasa dicatat setelah jasa disalurkan dan dinikmati oleh rumah tangga. PK-RT dinilai dengan harga pembeli, termasuk pajak atas produk, dan biaya pengiriman.

3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT merupakan lembaga yang dibentuk oleh rumah tangga atau kelompok masyarakat, yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi bagi anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Harga yang tidak berarti secara ekonomi adalah harga yang tidak punya pengaruh signifikan pada jumlah produsen yang ingin menyediakan barang dan jasa, serta pada jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen.

LNPRT dibedakan atas enam jenis lembaga, yaitu:

- Organisasi kemasyarakatan;
- Organisasi sosial;
- Organisasi profesi dan serikat buruh;
- Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi;
- Partai politik;
- Lembaga keagamaan.

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, konsumsi barang modal tetap, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer).

3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

Pemerintah merupakan unit institusi yang dibentuk melalui proses politik dan punya otoritas di bidang lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif atas unit institusi lain di dalam suatu negara/wilayah. Dalam perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen, produsen, dan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah menyediakan barang dan jasa pada individu atau masyarakat secara gratis atau pada harga yang tidak signifikan secara ekonomi.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir, terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Pengeluaran konsumsi kolektif adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa diakses seluruh masyarakat, contohnya, jasa pertahanan dan keamanan oleh TNI/Polri. Sementara itu, pengeluaran konsumsi individu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbatas jumlahnya dan hanya dapat dikonsumsi apabila memenuhi syarat tertentu (biasanya harga), contohnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas.

3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

3.5 Perubahan Inventori

Inventori didefinisikan sebagai aset berupa barang dan jasa yang disimpan untuk kemudian dijual, digunakan dalam kegiatan produksi atau penggunaan lainnya di waktu mendatang. Inventori dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu:

- Bahan baku dan penolong;

- Barang dalam penyelesaian;
- Barang jadi;
- Barang/jasa untuk dijual kembali;
- Inventori militer

Perubahan inventori menunjukkan transaksi yang terjadi dalam inventori. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Perubahan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke dalam inventori dikurangi nilai barang yang keluar dari inventori dan dikurangi nilai kerugian dari barang inventori yang terjadi secara reguler. Tidak termasuk kerugian yang luar biasa yang bersifat tidak teratur seperti kebakaran, kecurian, dan serangan hama.

3.6 Ekspor-Impor (Ekspor Neto)

Ekspor-impur didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor impor menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanaan, sedangkan untuk jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

BAB IV
TINJAUAN EKONOMI
KABUPATEN BULUNGAN
PENDEKATAN PRODUKSI
2019-2023

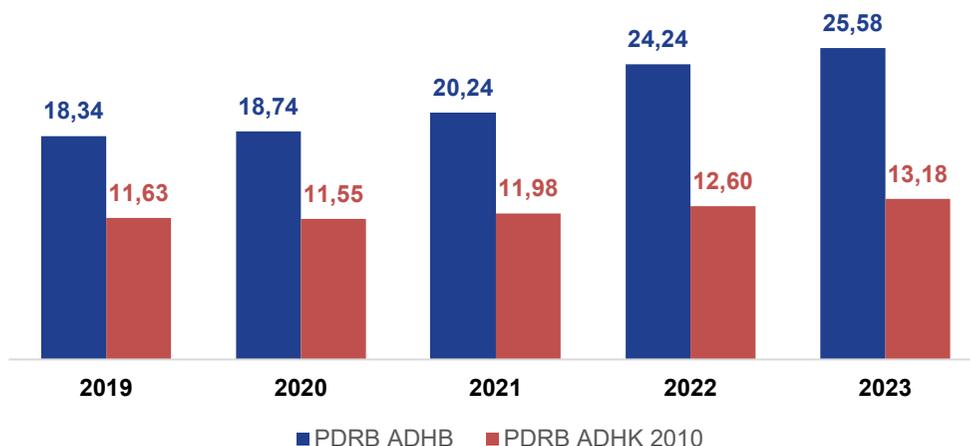
BAB IV

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BULUNGAN

PENDEKATAN PRODUKSI 2019-2023

4.1 PDRB Kabupaten Bulungan

Selama tahun 2019-2023, perekonomian regional Kabupaten Bulungan dilihat dari sisi besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari 18,34 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 25,58 triliun rupiah pada tahun 2023. Selain karena faktor kenaikan harga baik pada unit produksi maupun jasa yang secara langsung akan memberikan andil terhadap kenaikan nilai tambah atas dasar harga berlaku, kenaikan ini juga terjadi karena adanya kenaikan produksi di berbagai sektor. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pada nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) yang semula sebesar 11,63 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 13,18 triliun rupiah pada tahun 2023.

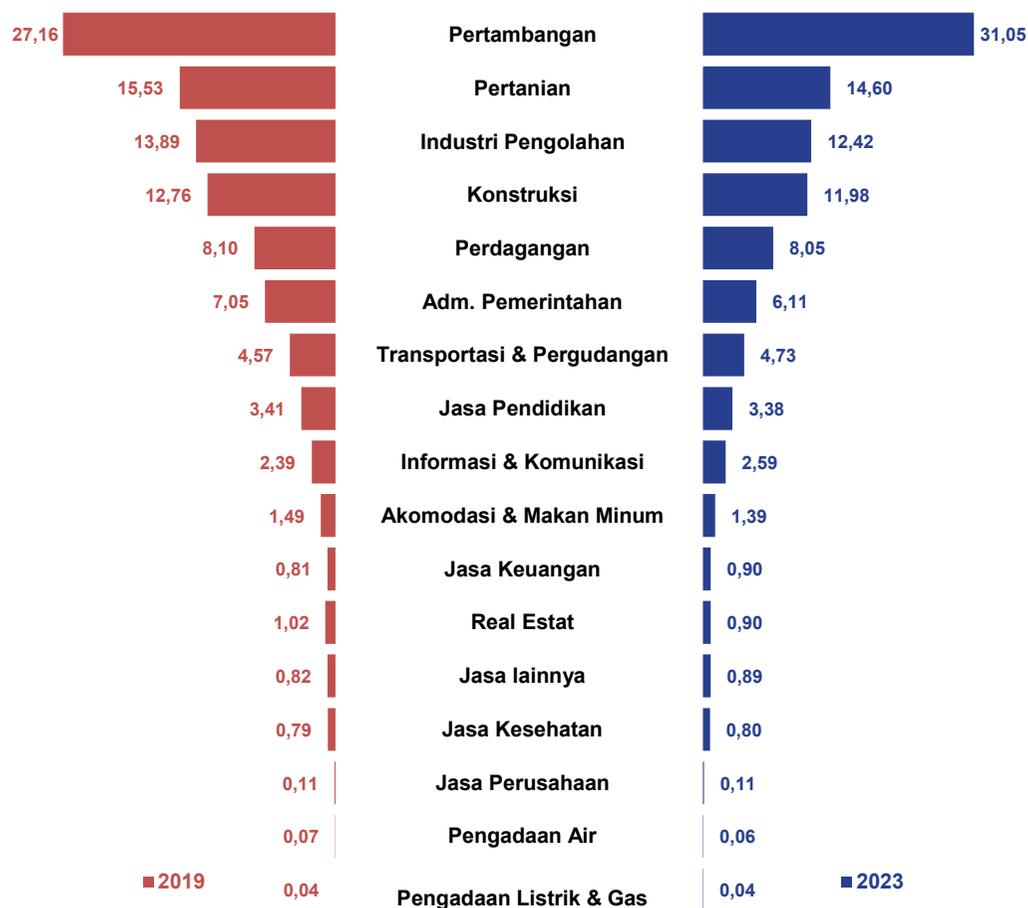


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (triliun rupiah)

4.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Bulungan

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.2 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulungan, 2019 dan 2023 (persen)

Struktur perekonomian Kabupaten Bulungan sebelum pandemi Covid-19 dan pada masa pemulihan tidak mengalami perubahan yang berarti. Struktur perekonomian Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 dan 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri

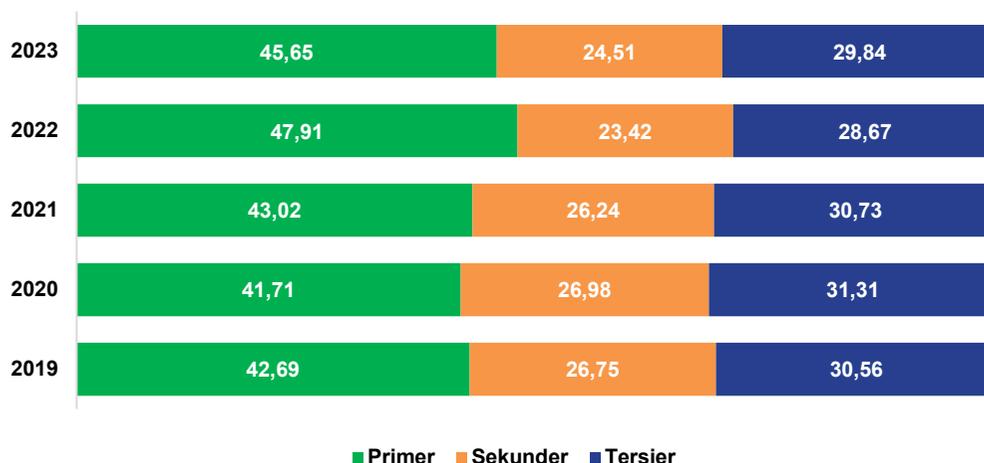
Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor pada posisi lima lapangan usaha tertinggi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 31,05 persen (meningkat dari 27,16 persen pada tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,60 persen (menurun dari 15,53 persen pada tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,42 persen (menurun dari 13,89 persen pada tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,98 persen (menurun dari 12,76 persen pada tahun 2019) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,05 persen (menurun dari 8,10 persen pada tahun 2019).

Selain berdasarkan tujuh belas kategori lapangan usaha, struktur ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga sektor ekonomi yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pengelompokan kedalam tiga sektor ini lebih memperjelas apa yang terjadi pada struktur perekonomian Kabupaten Bulungan.

Sektor Primer yang di dalamnya meliputi sektor pertanian dan pertambangan dapat dikatakan memiliki peranan yang strategis. Kontribusi sektor ini dapat menentukan keberlangsungan sektor-sektor lain yaitu sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer selalu dikaitkan dengan kegiatan dimana hasil outputnya adalah barang mentah atau barang yang siap untuk diproses kembali untuk dijadikan barang yang siap di konsumsi.

Sektor Sekunder seringkali dikaitkan dengan perindustrian. Kegiatan utama yang dilakukan pada sektor ini adalah mengolah barang mentah menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh sektor ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu barang input. Sektor ini memiliki peranan yang penting di dalam perekonomian karena produktivitas yang dilakukan cukup tinggi sehingga mendorong permintaan tenaga kerja di sektor ini sangat tinggi. Selain perolehan upah di sektor ini lebih baik daripada di sektor pertanian, juga karena adanya kesempatan untuk meningkatkan karir sehingga diharapkan untuk jangka panjang dapat memperbaiki standar hidup.

Sektor Tersier di era sekarang memiliki peranan yang sangat penting untuk perekonomian. Semakin hari semakin banyak lapangan usaha yang menjadi subsektor yang dimuat oleh sektor tersier. Sektor ini sangat erat kaitannya dengan jasa dimana saat ini lapangan usaha di bidang jasa selalu bertambah dan mengalami perkembangan tiap tahunnya. Pertambahan ini juga membuat kontribusinya terhadap PDRB semakin bertambah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulungan Menurut Kelompok Sektor, 2019-2023 (persen)

Struktur perekonomian Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu 2019-2023 didominasi oleh sektor primer. Sektor primer ini berkontribusi sekitar 41-48 persen dari perekonomian Kabupaten Bulungan. Hal ini tidak terlepas dari besarnya kontribusi lapangan usaha pertambangan dan pertanian yang mendominasi kegiatan perekonomian di Kabupaten Bulungan.

Akan tetapi, tingginya kontribusi sektor primer di Kabupaten Bulungan tidak diikuti oleh peranan sektor sekunder yang ada di Kabupaten Bulungan. Sektor sekunder memiliki kontribusi terendah dibandingkan sektor lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses industrialisasi di Kabupaten Bulungan belum terlaksana secara optimal dimana output dari sektor primer belum dilakukan pengolahan. Dengan kata lain, output dari sektor primer di Kabupaten Bulungan sebagian besar dijual ke luar daerah dalam bentuk barang mentah.

Sektor tersier di Kabupaten Bulungan memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor primer. Hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya wilayah Kabupaten Bulungan sebagai pusat ibukota Provinsi Kalimantan Utara menyebabkan semakin berkembangnya sektor jasa di wilayah ini.

4.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya sumber daya alam yang merupakan faktor input yang akan diubah menjadi output. Sumber daya alam yang beraneka ragam menjadikan kekayaan akan bahan baku untuk dijadikan beraneka jenis produk tanpa harus mengimpor dari luar wilayah. Faktor yang kedua ialah akumulasi modal, yakni pendapatan yang ditabung untuk diinvestasikan ke produksi dalam bentuk bahan baku peralatan, pabrik baru dan infrastruktur. Faktor ketiga ialah pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk merupakan penambahan jumlah tenaga kerja produktif untuk mengerjakan proses produksi. Faktor yang keempat ialah kemajuan teknologi yang merupakan kemajuan hasil riset tentang penemuan penemuan baru dan teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktifitas lebih cepat. Faktor yang terakhir ialah sistem sosial dan sikap masyarakat yang memegang peranan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diketahui bersama, kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB di daerah tersebut sehingga sedikit saja perubahan yang terjadi (baik itu penurunan/penambahan produksi) maka akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian yang secara umum akan tergambar melalui pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bulungan tahun 2019-2023 memiliki tren yang meningkat kendati sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan pada tahun 2023, mencapai 13,18 triliun rupiah, meningkat sebesar 579 miliar rupiah dibanding tahun 2022 yang sebesar 12,60 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 di Kabupaten Bulungan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen.

Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,71	4,01	2,82	4,48	2,66
B Pertambangan dan Penggalian	-0,81	-4,21	6,00	6,29	3,80
C Industri Pengolahan	4,89	-2,81	2,25	3,25	0,89
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,22	11,50	6,62	6,84	20,46
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,10	4,86	0,55	4,66	5,02
F Konstruksi	10,26	-2,95	0,30	1,39	11,82
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,71	1,18	6,81	8,58	6,11
H Transportasi dan Pergudangan	8,00	-2,46	1,38	9,32	5,13
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,02	-5,45	3,41	10,46	8,45
J Informasi dan Komunikasi	9,62	6,17	7,73	7,12	5,28
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,39	1,16	7,06	8,83	13,33
L Real Estat	6,68	0,84	3,07	5,55	3,44
M,N Jasa Perusahaan	4,96	-0,52	2,51	6,66	5,15
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,99	0,54	0,12	3,01	3,10
P Jasa Pendidikan	10,30	6,12	4,16	4,49	4,95
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,02	11,23	9,62	1,38	1,97
R,S,T,U Jasa Lainnya	9,64	7,63	6,09	8,95	6,63
PDRB	4,70	-0,70	3,75	5,17	4,60

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ketidakstabilan perekonomian dunia secara global memberikan dampak terhadap melambatnya perekonomian Indonesia dan juga berdampak pada perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan khususnya. Melambatnya perekonomian Kabupaten Bulungan tersebut bukan berarti bahwa perekonomian mengalami penurunan, perekonomian Kabupaten Bulungan tetap mengalami peningkatan namun besarnya kenaikan peningkatan di tahun 2023 tidak sebesar peningkatan yang terjadi di tahun 2022.

Perlambatan yang terjadi di tahun 2023 tersebut diakibatkan karena melambatnya pertumbuhan pada kategori lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan selama ini yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian yang hanya mengalami pertumbuhan 3,80 persen pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang dapat tumbuh sebesar 6,29 persen.

Secara lebih lanjut, kategori lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 adalah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari andil pertumbuhannya. Sesuai dengan potensinya, masing-masing lapangan usaha memberikan andil yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan.

Semua lapangan usaha ekonomi tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2023 antara lain: Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 20,46 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 13,33 persen, dan Konstruksi sebesar 11,82 persen. Pertumbuhan ketiga lapangan usaha ini cenderung tinggi di antara lapangan usaha lain yang hanya tumbuh dibawah sembilan persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah selama tahun 2023 adalah Industri Pengolahan.

4.4 PDRB per Kapita

Selain pertumbuhan ekonomi, terdapat banyak dimensi yang dicakup untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat karena pembangunan tidak cukup hanya menyoar pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi, ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif karena masalah aspek multidimensi yang melatarbelakanginya. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah dengan PDRB per kapita sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan di suatu daerah.

Besaran nilai PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. PDRB per kapita dapat disajikan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Keduanya bisa digunakan untuk kepentingan statistik yang berbeda. PDRB per kapita ADHB menunjukkan rata-rata nilai tambah yang bisa dinikmati oleh setiap penduduk, sedangkan PDRB perkapita ADHK adalah nilai riil rata-rata yang dinikmati oleh penduduk. Pada negara yang sudah maju umumnya memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Peningkatan output dan nilai tambah ekonomi sektor-sektor produksi yang dimiliki suatu wilayah sudah seharusnya dinikmati oleh penduduknya. Keterlibatan sebagian besar penduduk dari sisi produksi maupun konsumsi menjadi tolak ukur bahwa mereka memperoleh manfaat dari peningkatan skala ekonomi. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada Gambar 4.4.



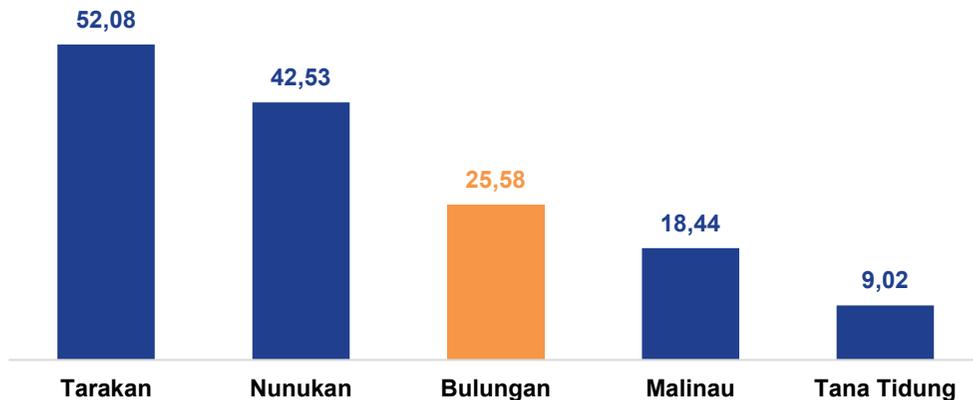
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.4 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (juta rupiah)

Nilai PDRB per kapita per tahun Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 161,83 juta rupiah, meningkat dari tahun 2022 yang hanya sebesar 155,55 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan faktor inflasi, secara nominal nilai PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 80,86 juta rupiah menjadi 83,38 juta rupiah pada tahun 2023. Kenaikan ini tak lepas dari pengaruh dari kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan yang mampu tumbuh searah dengan bertambahnya jumlah penduduk.

4.5 Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Nilai nominal PDRB yang tinggi di suatu daerah menunjukkan kinerja perekonomian yang berhasil mengelola potensi sumber daya dan faktor produksi yang ada. Perbandingan besaran nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku antar kabupaten/kota se Kalimantan Utara tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara, 2023 (triliun rupiah)

Pada Gambar 4.5 dapat dilihat nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulungan tahun 2023 mencapai 25,58 triliun rupiah dan berada di urutan ketiga setelah Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Adapun nilai PDRB terkecil adalah Kabupaten Tana Tidung sebesar 9,02 triliun rupiah. Perbedaan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kinerja perekonomian dari masing-masing kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara yang terjadi karena adanya perbedaan potensi sumber daya yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Semakin besar/banyak faktor produksi yang dimiliki oleh suatu wilayah kabupaten/kota maka akan semakin besar pula kemampuan wilayah tersebut untuk menghasilkan nilai tambah.

Kabupaten Nunukan dan Bulungan memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku terbesar tersebut merupakan wilayah yang memiliki modal luas wilayah dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian dan pertambangan yang menjadi faktor utama dari kemampuan penciptaan nilai tambah. Namun hal itu bertolak belakang dengan yang terjadi pada Kota Tarakan yang memiliki luas wilayah kecil dan potensi sumber daya alam yang sangat terbatas. Kota Tarakan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara di mana kegiatan ekonomi lebih terpusat di wilayah ini dan keberadaan faktor tenaga kerja yang berkualitas menjadi penentu keberhasilan dalam mengelola sumber daya alam yang ada walaupun dengan luas lahan yang terbatas. Disamping itu sebagai ibukota tentu prioritas pembangunan lebih tercurah kepada wilayah ini sehingga kota Tarakan memiliki banyak sarana dan prasarana yang sangat mendukung proses kegiatan ekonomi.

4.6 Analisis Tipologi Klassen

Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan besaran nilai PDRB antar kabupaten yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu dalam kondisi normal akan mampu memperoleh nilai tambah yang lebih dibandingkan kabupaten yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit. Dalam rangka membangun daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, walaupun mungkin berada dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi dengan melihat struktur ekonomi daerah secara menyeluruh.

Alat Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusi tiap daerah terhadap provinsi. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata kontribusi tiap daerah terhadap provinsi sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah maju dan tumbuh cepat (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah sedang berkembang (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Kriteria yang digunakan untuk membagi suatu daerah berada diposisi mana adalah sebagai berikut:

1. Daerah maju dan tumbuh cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
2. Daerah sedang berkembang adalah yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata provinsi, tetapi PDRB per kapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.
3. Daerah relatif tertinggal yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.
4. Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata provinsi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

Kriteria		Pertumbuhan Ekonomi	
		> rata-rata Provinsi	< rata-rata Provinsi
PDRB per Kapita	> rata-rata Provinsi	Maju dan Tumbuh Cepat: Malinau Tarakan	Maju tetapi Tertekan: Tana Tidung
	< rata-rata Provinsi	Sedang Berkembang: -	Relatif Tertinggal: Bulungan Nunukan

Sumber: data diolah

Gambar 4.6 Kuadran Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2019-2023

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, dapat dilihat beberapa daerah ada yang berhasil tumbuh berdikari membangun wilayah dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, tidak sedikit juga yang kurang beruntung dan terkendala beberapa masalah. Daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah akan diuntungkan dengan keunggulan komparatifnya. Sementara, daerah yang relatif kecil dukungan sumber dayanya harus dapat menyusun strategi pembangunan melalui peningkatan produktivitas.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Bulungan berada pada kuadran daerah relatif tertinggal. Hal ini dikarenakan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten Bulungan berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Perekonomian Kabupaten Bulungan yang ditopang oleh sektor primer dan berkategori daerah relatif tertinggal mengindikasikan adanya permasalahan produktivitas dalam perekonomiannya. Keadaan ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan menjadi daerah maju dan tumbuh cepat mengingat posisinya yang strategis sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

BAB V
TINJAUAN EKONOMI
KABUPATEN BULUNGAN
PENDEKATAN ENGELUARAN
2019-2023

BAB V
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BULUNGAN
PENDEKATAN PENGELUARAN 2019-2023

5.1 Struktur Perekonomian Kabupaten Bulungan

Dari segi pendekatan pengeluaran, terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (PK-RT), konsumsi LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto atau ekspor dikurangi impor antar daerah. Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa selama periode 2019-2023, produk yang dihasilkan di wilayah domestik sebagian besar masih digunakan untuk investasi atau pembentukan modal tetap bruto (di atas 45 persen). Di sisi lain, proporsi konsumsi akhir rumah tangga berada pada rentang 16-18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran rumah tangga dalam menyerap produk domestik cukup besar. Konsumsi akhir pemerintah mempunyai peran yang relatif kecil hanya sekitar 9-12 persen. Sementara itu, untuk ekspor neto antar wilayah Kabupaten Bulungan mempunyai porsi yang cukup besar yaitu 13-27 persen. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan ekonomi di wilayah Kabupaten Bulungan pada barang dan jasa yang disuplai dari luar daerah baik antar kabupaten, antar propinsi, dan luar negeri masih cukup besar. Nilai tambah dari kegiatan ekspor luar negeri terutama batubara diharapkan menjadi andalan dalam mendongkrak nilai ekspor Kabupaten Bulungan.

Tabel 5.1 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	18,83	18,66	17,98	16,24	16,85
Konsumsi LNPRT	0,72	0,75	0,70	0,64	0,70
Konsumsi Pemerintah	11,57	12,56	11,59	9,95	10,71
PMTB	55,31	54,28	51,33	45,96	49,71
Perubahan Inventori	0,13	0,14	0,13	0,12	0,11
Ekspor Neto	13,44	13,61	18,26	27,09	21,91
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dari pendekatan pengeluaran memperlihatkan bahwa tren pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2019-2023 masih cukup baik meskipun ada beberapa komponen yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Faktor indikatif dari pendekatan pengeluaran yang memacu laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan tahun 2023 ada pada komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, dan PMTB meskipun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi namun dapat dikatakan cukup stabil.

Kinerja ekspor neto di Kabupaten Bulungan tahun 2023 mengalami kontraksi pertumbuhan. Kondisi ini disebabkan Kabupaten Bulungan ternyata masih menjadi tujuan pemasaran produk dari luar daerah, terutama hasil/komoditi industri pengolahan. Di sisi lain, terdapat kebutuhan komoditas dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain yang memang harus disuplai dari luar daerah karena tidak tersedia pada produksi lokal atau belum mampu untuk mencukupi kebutuhan lokal. Selain itu, kondisi perdagangan ke luar daerah tahun 2023 mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan komoditi utama pada ekspor luar negeri yaitu batubara mengalami penurunan produksi sehingga mengalami penurunan volume ekspor luar negeri di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian masih perlu didorong dengan penguatan investasi baik yang dibiayai pemerintah maupun swasta.

Tabel 5.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Bulungan, 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	5,78	-0,38	3,14	4,14	5,91
Konsumsi LNPRT	10,37	5,60	-0,95	4,66	10,53
Konsumsi Pemerintah	4,76	13,09	-0,87	-1,39	8,93
PMTB	6,47	-1,74	0,68	2,84	9,20
Perubahan Inventori	3,15	12,08	-6,95	1,55	2,24
Ekspor Neto	-0,29	-5,19	14,67	14,25	-7,33
PDRB	4,70	-0,70	3,75	5,17	4,60

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam kurun waktu 2019–2023, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami peningkatan signifikan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bulungan. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai PK-RT, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara total, pertumbuhan PK-RT atas dasar harga konstan sebesar 5,78 persen pada tahun 2019. Selanjutnya, pertumbuhan PK-RT meningkat menjadi 5,91 persen pada tahun 2023.

Akselerasi pertumbuhan terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT). Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 10,53 persen, menguat dibanding pertumbuhan tahun 2022 sebesar 4,66 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan sebagian LNPRT dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Kondisi tersebut juga identik pada tahun 2019, dimana pada tahun tersebut komponen PK-LNPRT juga tumbuh impresif akibat adanya kegiatan Pemilu 2019.

Komponen PDRB pengeluaran lain yang mengalami peningkatan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Komponen PK-P tahun 2023 tumbuh sebesar 8,93 persen, menguat dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,39 persen. Pertumbuhan realisasi belanja pegawai dan belanja modal APBN dan APBD menjadi salah satu pendorong pertumbuhan PK-P.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi utama Kabupaten Bulungan juga didorong oleh peningkatan aktivitas investasi, yang dapat dilihat dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Secara keseluruhan, komponen PMTB di Kabupaten Bulungan mengalami pertumbuhan impresif di tahun 2023, dengan laju pertumbuhan 9,20 persen, lebih tinggi dibanding capaian pertumbuhan tahun 2022 (sebesar 2,84 persen). Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya aktivitas penyelesaian proyek strategis nasional, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Selain itu, perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintah di Kabupaten Bulungan juga menyumbang pertumbuhan PMTB.

Kinerja ekspor neto antar daerah mengalami kontraksi sebesar 7,33 pada tahun 2023. Sumber kontraksi utama bersumber dari ekspor barang hasil pertambangan yang mengalami kontraksi. Perdagangan barang hasil pertambangan terutama batubara masih menjadi komoditas utama dalam kegiatan ekspor neto antar daerah di Kabupaten Bulungan.

5.3 Analisis ICOR

ICOR atau *Incremental Capital Output Ratio* merupakan salah satu bagian dari alat analisis statistik deskriptif yang dikembangkan secara khusus terkait dengan kajian investasi ekonomi makro. ICOR secara sederhana diartikan sebagai besaran yang menunjukkan banyaknya investasi yang dibutuhkan (penambahan kapasitas produksi) untuk dapat meningkatkan output sebanyak satu unit satuan. Sebenarnya peningkatan output tidak hanya dipengaruhi faktor investasi yang ditanamkan, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya, seperti pertumbuhan pada produktivitas, utilisasi kapasitas produksi, kemajuan teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi dalam penghitungan ICOR kali ini diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tersebut dianggap konstan. Penggunaan ICOR pada publikasi ini hanya merupakan sebuah alat saja, namun pemanfaatannya bisa berkembang berdasarkan kebutuhan para pengambil keputusan.

Secara matematis koefisien ICOR dinyatakan sebagai rasio antara penambahan kapital (ΔK) terhadap penambahan output (ΔY). Atau secara matematis dinotasikan sebagai berikut :

$$ICOR = \Delta K / \Delta Y$$

Adapun data mengenai kenaikan Output didekati dengan kenaikan NTB yang diperoleh dari hasil penghitungan PDRB yang telah dipublikasikan. Dengan demikian rumus dasar yang telah dikemukakan sebelumnya berubah menjadi:

$$\begin{aligned}\Delta K &= I , \\ \Delta Y &= \Delta PDRB \\ ICOR &= I / \Delta PDRB\end{aligned}$$

Rumus ini disebut juga dengan *Gross ICOR*. Dalam penerapannya rumus ini lebih sering dipakai karena datanya lebih lengkap. Perlu diketahui bahwasanya semua pengukuran melalui metode yang ada tersebut secara teori sudah memenuhi kaidah ilmiah. Penghitungan berdasarkan nilai investasi yang didekati dengan nilai Komponen PMTB dan Output yang didekati dengan nilai PDRB, dimana keduanya dinilai dalam harga konstan (atas dasar harga konstan 2010) agar pengaruh fluktuasi harga dalam ukuran ICOR dapat dihilangkan.

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat

menghasilkan tambahan output disebut *time lag* (lag). ICOR tahunan pada publikasi ini dihitung dengan lag 0 artinya investasi yang ditanam pada tahun tersebut akan menghasilkan nilai tambah pada tahun tersebut juga.

Tabel 5.3 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Bulungan, 2019-2023

Tahun	Nilai Investasi/PMTB (juta rupiah)	Perubahan Output/ Perubahan PDRB (juta rupiah)	ICOR Lag 0
2019	5.836.516	522.279	11,18
2020	5.735.028	-81.587	-70,29
2021	5.774.052	432.755	13,34
2022	5.937.963	619.638	9,58
2023	6.484.529	579.054	11,20

Sumber: data diolah

Pada tabel 5.3 diketahui koefisien ICOR pada tahun 2023 adalah sebesar 11,20. Hal ini berarti untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 (satu) unit pada tahun 2023 diperlukan tambahan investasi sebesar 11,20 unit. Angka tersebut dapat juga diartikan bahwa untuk meningkatkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp 1 miliar dibutuhkan investasi sebesar Rp 6,88 miliar. Selama kurun waktu 2019-2023, nilai koefisien ICOR per tahun selalu lebih besar dari 10 kecuali pada tahun 2020 dimana nilai koefisien ICOR bernilai negatif. Koefisien yang cukup besar di kurun waktu tahun tersebut bukan berarti investasi yang ditanamkan belum atau tidak produktif, tetapi perlu waktu beberapa tahun ke depan untuk mampu menghasilkan nilai tambah sebagai hasil dari penanaman investasi pada tahun tersebut. Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tersebut relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan sebenarnya lebih besar tetapi nilainya hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau dengan kata lain tambahan output yang dihasilkan relatif kecil sehingga investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif sehingga relatif kurang efisien.

Adapun nilai ICOR dengan tanda negatif pada tahun 2020 menunjukkan bahwa investasi belum dapat menghasilkan penambahan output. Hal ini terjadi karena adanya penurunan output dibandingkan dengan tahun sebelumnya. adanya penambahan barang modal baru, akan tetapi barang modal baru itu sementara belum berproduksi atau sudah berproduksi tetapi output yang dihasilkan belum sesuai dengan besarnya kapasitas produksi yang sebenarnya, sehingga selisih output antara tahun pada saat

ditanamkan investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR menjadi negatif. Kondisi nilai ICOR yang bernilai negatif pada tahun 2020 tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terhenti akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang akhirnya berdampak pada penurunan output ekonomi.

Apabila pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik, maka lakukan investasi yang paling memungkinkan pada sektor ekonomi yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Apabila dari APBD setempat tidak bisa menunjang besarnya investasi yang diperlukan, maka sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi. Saat ini pertumbuhan ekonomi diharapkan dari tingginya konsumsi masyarakat atau dengan kata lain konsumsi masyarakat diharapkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Padahal konsumsi masyarakat tidak mungkin terus tinggi tanpa adanya peningkatan pendapatan di sektor riil tempat dimana masyarakat bekerja dan memperoleh penghasilan. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan sektor riil memerlukan investasi, baik dalam bentuk perluasan/ekspansi maupun investasi baru.

BAB VI
TINJAUAN KHUSUS
FENOMENA PENDUKUNG

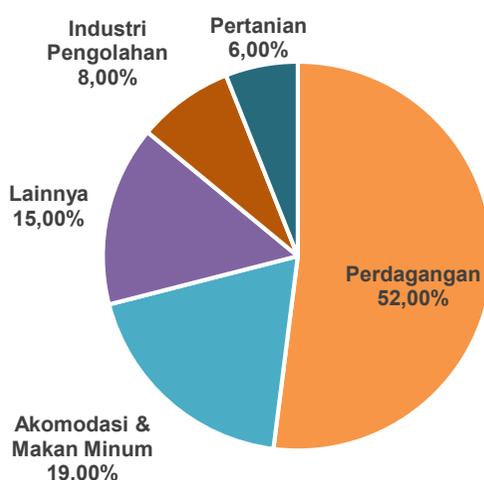
BAB VI

TINJAUAN KHUSUS FENOMENA PENDUKUNG

Perekonomian di Kabupaten Bulungan tahun 2023 tumbuh sebesar 4,60 persen. Pertumbuhan ini relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,17 persen. Untuk memperoleh tambahan informasi perihal fenomena perekonomian yang terjadi di Kabupaten Bulungan, dilaksanakan Survei Khusus Fenomena Perekonomian Kabupaten Bulungan. Survei ini dilakukan untuk memberikan gambaran perekonomian yang terjadi pada tahun 2023 dari perspektif pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bulungan. Survei dilaksanakan dengan metode *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive and quota sampling*. Jumlah sampel dalam survei tersebut sebanyak 100 usaha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan.

6.1 Gambaran Umum Usaha

Berdasarkan hasil survei khusus diperoleh gambaran umum usaha yang menjadi sampel. Gambaran umum usaha dari sampel tersebut sekitar 52 persen berkategori usaha perdagangan, 19 persen berupa usaha akomodasi dan makan minum, 8 persen berupa usaha industri pengolahan, 6 persen berupa usaha pertanian, dan sisanya merupakan usaha lainnya.



Sumber: data diolah

Gambar 6.1 Gambaran Umum Kategori Usaha Sampel Tahun 2023

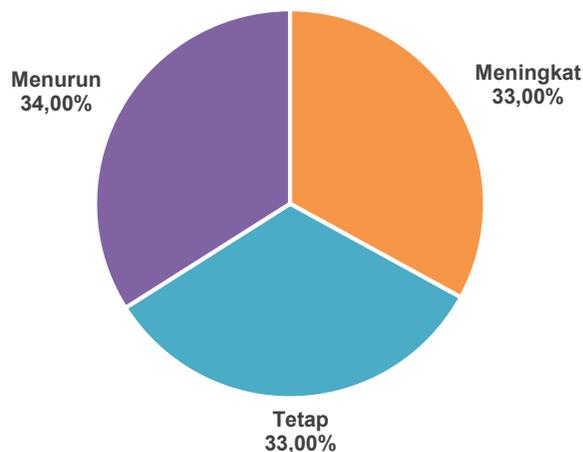
Dari gambaran umum tersebut diketahui bahwa kategori usaha yang paling banyak menjadi sampel adalah usaha perdagangan dan akomodasi dan makan minum. Hal ini menjelaskan bahwa kategori usaha tersebut merupakan jenis usaha yang cukup mudah ditemukan di masyarakat, khususnya dalam skala usaha kecil dan menengah.

6.2 Kondisi Perekonomian Usaha

Pada bagian ini, dibahas mengenai kondisi perekonomian usaha yang menjadi sampel survei khusus. Fenomena perekonomian yang dianalisis meliputi kondisi perkembangan omset usaha, rata-rata jam kerja per hari, jumlah tenaga kerja, harga barang input/bahan baku, kondisi perekonomian secara umum, dan prospek usaha di tahun berjalan.

Perkembangan Omset Usaha

Perkembangan omset usaha sampel yang dibahas pada bagian ini menggambarkan kondisi perkembangan total omset usaha sampel pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan pada tahun 2023 proporsi usaha sampel yang mengalami penurunan omset usaha memiliki proporsi sebesar 34 persen dan proporsi usaha sampel yang mengalami peningkatan dan tetap memiliki proporsi yang sama yaitu sebesar 33 persen usaha.



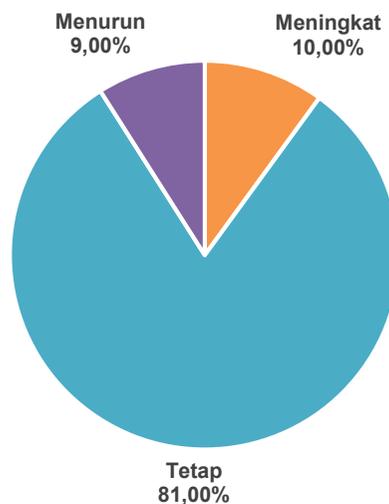
Sumber: data diolah

Gambar 6.2 Perkembangan Omset Usaha Sampel Tahun 2023

Proporsi usaha sampel yang mengalami peningkatan dan penurunan omset usaha pada tahun 2023 memiliki proporsi yang sama besar mengindikasikan bahwa pada skala usaha kecil dan menengah kondisi perekonomian usaha tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kondisi makro perekonomian Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 tidak banyak berubah dibandingkan tahun 2022. Kendati pada tahun 2023 Kabupaten Bulungan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen, tetapi pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,17 persen.

Perkembangan Rata-Rata Jam Kerja Usaha

Perkembangan rata-rata jam kerja usaha sampel yang dibahas pada bagian ini menggambarkan kondisi perkembangan rata-rata jam kerja per hari usaha sampel pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan pada tahun 2023 proporsi usaha sampel sebagian besar tidak mengalami perubahan rata-rata jam kerja, hanya sebesar 10 persen usaha sampel yang mengalami peningkatan rata-rata jam kerja serta 9 persen usaha sampel yang mengalami penurunan rata-rata jam kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar usaha sampel tidak ada upaya untuk melakukan penambahan jam kerja guna meningkatkan output usaha yang dihasilkan. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar usaha sampel merupakan usaha perdagangan dan akomodasi dan makan minum yang biasanya sudah memiliki ketentuan jam kerja.

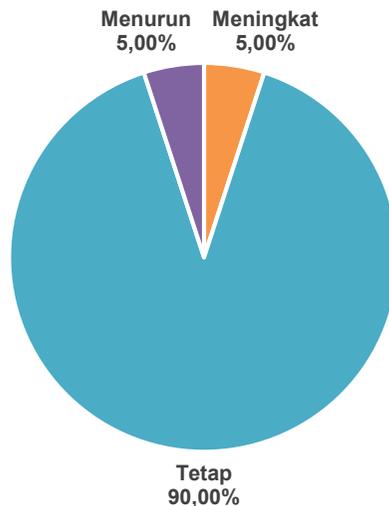


Sumber: data diolah

Gambar 6.3 Perkembangan Rata-Rata Jam Kerja Usaha Sampel Tahun 2023

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Usaha

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang dibahas pada bagian ini menggambarkan kondisi perkembangan jumlah tenaga kerja usaha sampel pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan pada tahun 2023 proporsi usaha sampel sebagian besar tidak mengalami perubahan jumlah tenaga kerja, hanya sebesar masing-masing 5 persen usaha sampel yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar usaha sampel tidak mengalami perubahan output yang signifikan sehingga usaha sampel tidak memerlukan tambahan tenaga kerja dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa usaha sampel yang merupakan usaha kecil dan menengah tidak mengalami perubahan output yang signifikan.



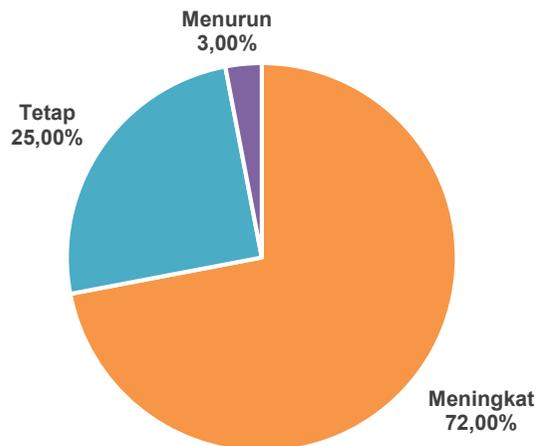
Sumber: data diolah

Gambar 6.4 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Usaha Sampel Tahun 2023

Perkembangan Harga Barang Input/Bahan Baku Usaha

Perkembangan harga barang input/bahan baku yang dibahas pada bagian ini menggambarkan kondisi perkembangan harga barang input/bahan baku yang digunakan usaha sampel pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan bahwa sebagian besar usaha sampel mengalami peningkatan harga barang input/bahan baku dengan persentase sebesar 72 persen. Sebesar 25 persen usaha sampel tidak mengalami perubahan harga barang input/bahan

baku dan hanya sebesar 3 persen usaha sampel yang mengalami penurunan harga barang input/bahan baku. Kecenderungan harga barang dan jasa yang meningkat setiap tahunnya tentunya dapat berdampak pada peningkatan harga barang input/bahan baku usaha sampel. Sebagian besar sampel usaha yang merupakan usaha perdagangan dan akomodasi dan makan minum membutuhkan berbagai macam barang input/bahan baku yang umum dikonsumsi masyarakat dimana barang-barang tersebut cenderung memiliki harga berfluktuatif dari waktu ke waktu.



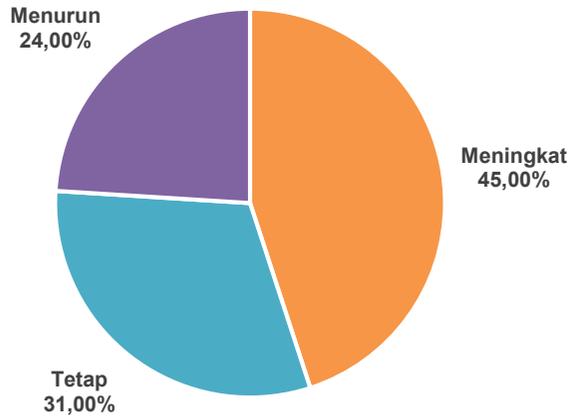
Sumber: data diolah

Gambar 6.5 Perkembangan Harga Barang Input/Bahan Baku Usaha Sampel Tahun 2023

Perspektif Perekonomian Secara Umum

Perspektif perekonomian secara umum pada bagian ini menggambarkan perspektif responden terhadap perekonomian secara umum di daerah sekitar pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan bahwa sebesar 45 persen perspektif responden terhadap kondisi perekonomian secara umum mengalami peningkatan, sebesar 31 persen perspektif responden terhadap perekonomian secara umum tidak mengalami perubahan, dan 24 persen perspektif responden terhadap perekonomian secara umum mengalami penurunan. Besarnya perspektif responden terhadap perekonomian secara umum yang mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan.

Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Bulungan tumbuh sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

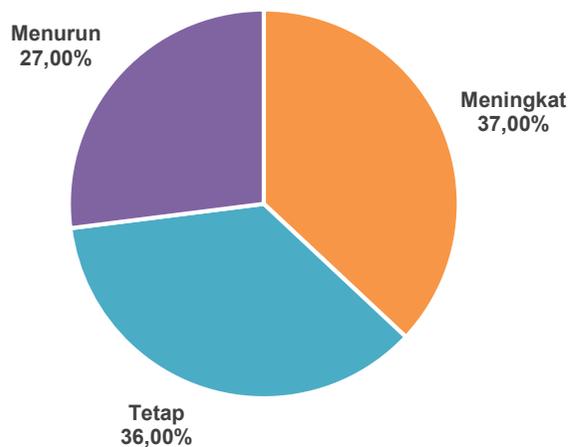


Sumber: data diolah

Gambar 6.6 Perspektif Responden terhadap Perekonomian Secara Umum Tahun 2023

Prospek Perkembangan Usaha

Prospek perkembangan usaha yang dibahas pada bagian ini menggambarkan prospektif responden terhadap perkembangan usaha sampel pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Prospektif perkembangan usaha diperlukan untuk memperoleh gambaran prospektif atau potensi dari usaha sampel di tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan bahwa sebesar 37 persen prospek usaha sampel akan mengalami peningkatan di tahun 2024, sebesar 36 persen prospek usaha sampel tidak mengalami peningkatan, dan sebesar 27 persen prospek usaha sampel mengalami penurunan. Masih cukup besarnya prospek usaha sampel yang meningkat menggambarkan optimisme dari usaha sampel dalam menjalani perekonomian di tahun 2024. Dengan optimisme tersebut diharapkan perekonomian tahun 2024 dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: data diolah

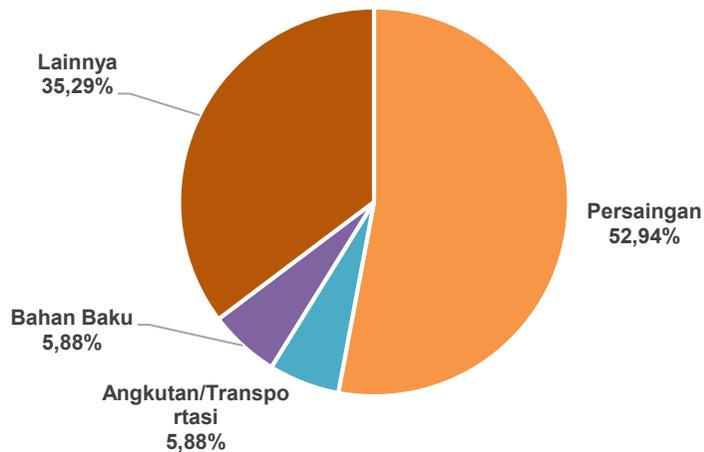
Gambar 6.7 Prospek Perkembangan Usaha Sampel Tahun 2024

6.3 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

Pada bagian ini, dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha yang menjadi sampel survei khusus. Perkembangan usaha yang dianalisis meliputi faktor yang menyebabkan penurunan omset usaha, faktor yang mempengaruhi peningkatan omset, serta kendala yang dihadapi usaha sampel selama tahun 2023.

Faktor Utama Penurunan Omset

Faktor utama penurunan omset usaha yang dibahas bagian ini menggambarkan faktor utama penyebab penurunan omset oleh usaha sampel yang mengalami penurunan omset pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan bahwa 52,94 persen usaha sampel yang mengalami penurunan omset disebabkan oleh adanya persaingan dalam menjalankan usaha. Hal ini tidak terlepas dari adanya pasar persaingan sempurna dimana sistem pasar ditentukan oleh permintaan konsumen dan penawaran produsen yang bebas. Setiap pelaku usaha bebas untuk masuk ke pasar perekonomian untuk menggaet konsumennya sehingga muncul adanya persaingan yang sehat. Selain itu, faktor utama penyebab penurunan omset usaha sampel yaitu faktor lainnya sebesar 35,29 persen, bahan baku dan angkutan/transportasi masing-masing sebesar 5,88 persen.

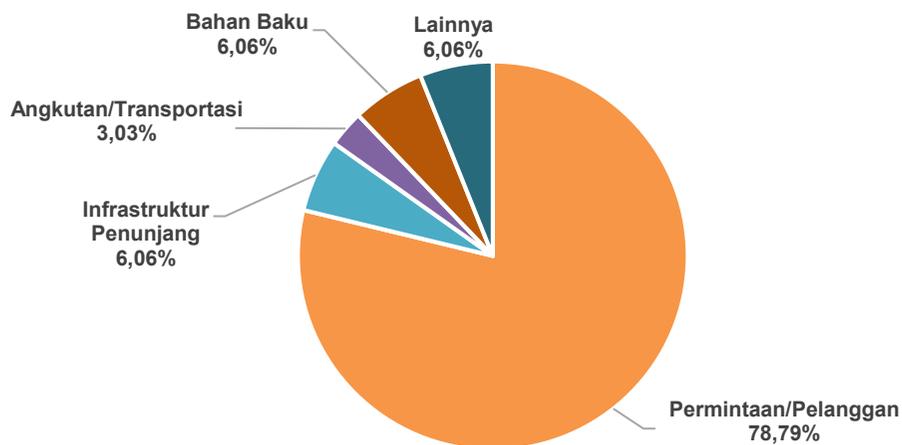


Sumber: data diolah

Gambar 6.8 Faktor Utama Penurunan Omset Usaha Sampel Tahun 2023

Faktor Utama Peningkatan Omset

Faktor utama peningkatan omset usaha yang dibahas bagian ini menggambarkan faktor utama penyebab peningkatan omset oleh usaha sampel yang mengalami peningkatan omset pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan bahwa 78,79 persen usaha sampel yang mengalami peningkatan omset disebabkan oleh banyaknya permintaan/pelanggan dalam menjalankan usaha. Hal ini tidak terlepas dari adanya pasar persaingan sempurna dimana sistem pasar ditentukan oleh permintaan konsumen dan penawaran produsen yang bebas. Banyaknya permintaan/pelanggan tentu sangat mempengaruhi produksi atau output yang dihasilkan oleh suatu usaha. Jumlah permintaan tentunya berbanding lurus dengan omset yang dihasilkan. Selain itu, faktor utama penyebab peningkatan omset usaha sampel yaitu faktor infrastruktur penunjang yang baik, bahan baku yang mudah diperoleh, dan faktor lainnya masing-masing sebesar 6,06 persen, dan faktor angkutan/transportasi yang membaik sebesar 3,03 persen.



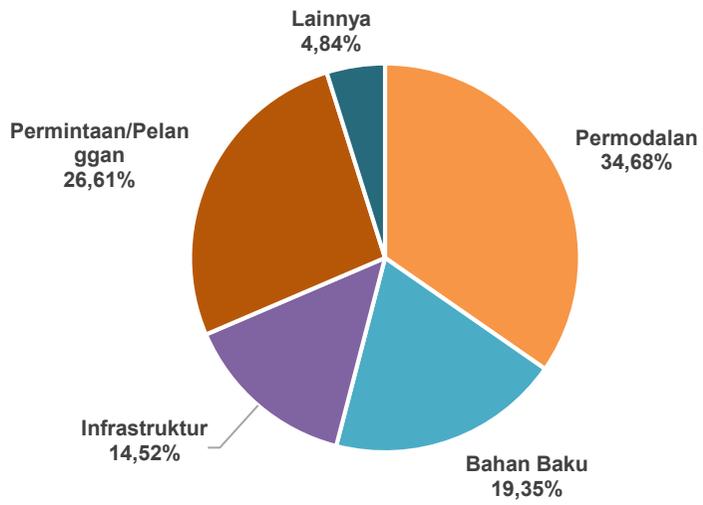
Sumber: data diolah

Gambar 6.9 Faktor Utama Peningkatan Omset Usaha Sampel Tahun 2023

Kendala yang Dialami Usaha

Kendala yang dialami usaha yang dibahas bagian ini menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi usaha sampel dalam menjalankan usahanya pada tahun 2023. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan bahwa kendala terbesar yang dialami usaha sampel dalam menjalankan usaha yaitu permodalan dengan persentase sebesar 34,68 persen. Permodalan merupakan hal utama yang diperlukan oleh usaha saat akan memperbesar kapasitas/produksi dari suatu usaha.

Selanjutnya, kendala yang dialami usaha sampel dalam menjalankan usaha yaitu permintaan/pelanggan dengan persentase sebesar 26,61 persen. Dalam menjalankan usaha tentunya diperlukan adanya permintaan dari pasar atau pelanggan agar usaha menjalankan proses produksinya. Selain itu, kendalan yang dialami usaha sampel dalam menjalankan usaha yaitu bahan baku, infrastruktur, dan lainnya dengan persentase masing-masing sebesar 19,35 persen, 14,52 persen, dan 4,84 persen. Bahan baku yang terjangkau dan mudah diperoleh tentunya akan mempermudah/mempercepat proses produksi usaha. Infrastruktur baik infrastruktur usaha maupun penunjang juga dibutuhkan oleh para usaha dalam menjalankan usahanya.



Sumber: data diolah

Gambar 6.10 Kendala yang Dialami Usaha Sampel Tahun 2023

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasannya dari bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari 18,34 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 25,58 triliun rupiah pada tahun 2023. Selain karena faktor kenaikan harga baik pada unit produksi maupun jasa yang secara langsung akan memberikan andil terhadap kenaikan nilai tambah atas dasar harga berlaku, kenaikan ini juga terjadi karena adanya kenaikan produksi di berbagai sektor. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pada nilai PDRB atas dasar harga konstan yang semula sebesar 11,63 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 13,18 triliun rupiah pada tahun 2023.
2. Dari sisi produksi, struktur perekonomian Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 dan 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor pada posisi lima lapangan usaha tertinggi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian Kabupaten Bulungan sebagian besar masih digunakan untuk investasi atau pembentukan modal tetap bruto.
3. Di tengah ketidakstabilan perekonomian dunia secara global memberikan dampak terhadap melambatnya perekonomian Indonesia dan juga berdampak pada perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan khususnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 4,60 persen.
4. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Bulungan berada pada kuadran daerah relatif tertinggal. Hal ini dikarenakan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten Bulungan berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan, berdasarkan analisis ICOR diperoleh nilai koefisien ICOR per tahun selalu lebih besar dari 10 kecuali pada tahun 2020 dimana nilai koefisien ICOR bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan belum atau tidak produktif, tetapi perlu waktu beberapa

tahun ke depan untuk mampu menghasilkan nilai tambah sebagai hasil dari penanaman investasi pada tahun tersebut.

5. Berdasarkan hasil survei khusus menunjukkan pada tahun 2023 proporsi usaha sampel yang mengalami penurunan omset usaha memiliki proporsi sebesar 34 persen dan proporsi usaha sampel yang mengalami peningkatan dan tetap memiliki proporsi yang sama yaitu sebesar 33 persen usaha. Sedangkan kendala kendala terbesar yang dialami usaha sampel dalam menjalankan usaha yaitu permodalan.

7.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kesimpulan antara lain:

1. Perekonomian Kabupaten Bulungan yang ditopang oleh sektor primer dan berkategori daerah realtif tertinggal mengindikasikan adanya permasalahan produktivitas dalam perekonomiannya. Keadaan ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan menjadi daerah maju dan tumbuh cepat mengingat posisinya yang strategis sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sebaiknya investasi dilakukan sektor ekonomi yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Apabila dari APBD setempat tidak bisa menunjang besarnya investasi yang diperlukan, maka sektor swasta harus dipacu untuk melengkapinya.
3. Pemerintah perlu menyediakan pinjaman permodalan bagi usaha kecil dan menengah untuk memperbesar kapasitas/produksi dari suatu usaha.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.849.438	3.079.963	3.259.844
B Pertambangan dan Penggalian	4.981.723	4.734.925	5.448.333
C Industri Pengolahan	2.547.409	2.623.878	2.771.824
D Pengadaan Listrik dan Gas	6.739	7.797	8.180
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.096	13.106	13.849
F Konstruksi	2.341.259	2.410.829	2.517.951
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.486.582	1.534.469	1.669.285
H Transportasi dan Pergudangan	838.613	839.957	864.239
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	272.892	263.830	277.282
J Informasi dan Komunikasi	437.804	494.656	544.705
K Jasa Keuangan dan Asuransi	148.632	158.465	176.644
L Real Estat	187.952	191.956	203.865
M,N Jasa Perusahaan	20.174	21.827	23.045
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.292.790	1.334.388	1.359.897
P Jasa Pendidikan	625.835	688.507	731.060
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144.455	167.549	186.009
R,S,T,U Jasa Lainnya	149.648	170.472	183.875
PDRB	18.344.046	18.736.572	20.239.896

Lanjutan Lampiran 1

Lapangan Usaha	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.541.664	3.733.879
B Pertambangan dan Penggalian	8.072.134	7.942.342
C Industri Pengolahan	3.003.848	3.177.380
D Pengadaan Listrik dan Gas	9.124	11.424
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.123	16.089
F Konstruksi	2.648.001	3.064.659
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.863.125	2.057.848
H Transportasi dan Pergudangan	1.049.057	1.209.558
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	317.332	354.728
J Informasi dan Komunikasi	613.682	662.595
K Jasa Keuangan dan Asuransi	200.674	230.580
L Real Estat	219.179	229.534
M,N Jasa Perusahaan	25.482	27.484
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.456.705	1.562.266
P Jasa Pendidikan	802.434	865.055
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193.940	204.151
R,S,T,U Jasa Lainnya	207.297	228.123
PDRB	24.238.800	25.577.696

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.871.306	1.946.259	2.001.047
B Pertambangan dan Penggalian	3.244.568	3.107.870	3.294.450
C Industri Pengolahan	1.503.335	1.461.050	1.493.871
D Pengadaan Listrik dan Gas	5.256	5.861	6.249
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.632	10.101	10.157
F Konstruksi	1.381.987	1.341.174	1.345.246
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	940.275	951.412	1.016.215
H Transportasi dan Pergudangan	533.801	520.669	527.851
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151.923	143.641	148.537
J Informasi dan Komunikasi	356.506	378.499	407.753
K Jasa Keuangan dan Asuransi	93.054	94.138	100.788
L Real Estat	151.334	152.609	157.302
M,N Jasa Perusahaan	13.320	13.251	13.584
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	759.761	763.900	764.794
P Jasa Pendidikan	417.851	443.432	461.874
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99.898	111.116	121.804
R,S,T,U Jasa Lainnya	94.824	102.062	108.280
PDRB	11.628.631	11.547.044	11.979.799

Lanjutan Lampiran 2

Lapangan Usaha	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.090.791	2.146.333
B Pertambangan dan Penggalian	3.501.583	3.634.617
C Industri Pengolahan	1.542.407	1.556.183
D Pengadaan Listrik dan Gas	6.676	8.042
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.630	11.163
F Konstruksi	1.363.948	1.525.130
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.103.372	1.170.790
H Transportasi dan Pergudangan	577.069	606.661
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	164.067	177.925
J Informasi dan Komunikasi	436.785	459.836
K Jasa Keuangan dan Asuransi	109.686	124.306
L Real Estat	166.034	171.746
M,N Jasa Perusahaan	14.488	15.234
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	787.832	812.282
P Jasa Pendidikan	482.617	506.530
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123.482	125.920
R,S,T,U Jasa Lainnya	117.971	125.794
PDRB	12.599.438	13.178.492

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,53	16,44	16,11	14,61	14,60
B Pertambangan dan Penggalian	27,16	25,27	26,92	33,30	31,05
C Industri Pengolahan	13,89	14,00	13,69	12,39	12,42
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
F Konstruksi	12,76	12,87	12,44	10,92	11,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,10	8,19	8,25	7,69	8,05
H Transportasi dan Pergudangan	4,57	4,48	4,27	4,33	4,73
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,49	1,41	1,37	1,31	1,39
J Informasi dan Komunikasi	2,39	2,64	2,69	2,53	2,59
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	0,85	0,87	0,83	0,90
L Real Estat	1,02	1,02	1,01	0,90	0,90
M,N Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,05	7,12	6,72	6,01	6,11
P Jasa Pendidikan	3,41	3,67	3,61	3,31	3,38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,89	0,92	0,80	0,80
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,82	0,91	0,91	0,86	0,89
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,71	4,01	2,82	4,48	2,66
B Pertambangan dan Penggalian	-0,81	-4,21	6,00	6,29	3,80
C Industri Pengolahan	4,89	-2,81	2,25	3,25	0,89
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,22	11,50	6,62	6,84	20,46
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,10	4,86	0,55	4,66	5,02
F Konstruksi	10,26	-2,95	0,30	1,39	11,82
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,71	1,18	6,81	8,58	6,11
H Transportasi dan Pergudangan	8,00	-2,46	1,38	9,32	5,13
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,02	-5,45	3,41	10,46	8,45
J Informasi dan Komunikasi	9,62	6,17	7,73	7,12	5,28
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,39	1,16	7,06	8,83	13,33
L Real Estat	6,68	0,84	3,07	5,55	3,44
M,N Jasa Perusahaan	4,96	-0,52	2,51	6,66	5,15
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,99	0,54	0,12	3,01	3,10
P Jasa Pendidikan	10,30	6,12	4,16	4,49	4,95
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,02	11,23	9,62	1,38	1,97
R,S,T,U Jasa Lainnya	9,64	7,63	6,09	8,95	6,63
PDRB	4,70	-0,70	3,75	5,17	4,60

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 5 Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,60	0,64	0,47	0,75	0,44
B Pertambangan dan Penggalian	-0,24	-1,18	1,62	1,73	1,06
C Industri Pengolahan	0,63	-0,36	0,28	0,41	0,11
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Konstruksi	1,16	-0,35	0,04	0,16	1,28
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,68	0,10	0,56	0,73	0,54
H Transportasi dan Pergudangan	0,36	-0,11	0,06	0,41	0,23
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	-0,07	0,04	0,13	0,11
J Informasi dan Komunikasi	0,28	0,19	0,25	0,24	0,18
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,04	0,01	0,06	0,07	0,12
L Real Estat	0,09	0,01	0,04	0,07	0,05
M,N Jasa Perusahaan	0,01	-0,00	0,00	0,01	0,01
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	0,04	0,01	0,19	0,19
P Jasa Pendidikan	0,35	0,22	0,16	0,17	0,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,10	0,09	0,01	0,02
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,08	0,06	0,05	0,08	0,06
PDRB	4,70	-0,70	3,75	5,17	4,60

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga	3.453.882	3.496.488	3.638.438
Konsumsi LNPRT	132.321	141.215	142.615
Konsumsi Pemerintah	2.122.197	2.353.084	2.346.513
PMTB	10.146.649	10.169.612	10.389.956
Perubahan Inventori	23.251	26.419	26.419
Ekspor Neto	2.465.746	2.549.754	3.695.955
PDRB	18.344.047	18.736.572	20.239.896

Lanjutan Lampiran 6

Komponen Pengeluaran	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	3.937.548	4.308.956
Konsumsi LNPRT	156.245	179.501
Konsumsi Pemerintah	2.411.209	2.740.184
PMTB	11.140.532	12.715.947
Perubahan Inventori	28.142	28.864
Ekspor Neto	6.565.125	5.604.245
PDRB	24.238.800	25.577.696

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga	2.112.121	2.104.023	2.170.023
Konsumsi LNPRT	79.696	84.160	83.360
Konsumsi Pemerintah	1.138.812	1.287.930	1.276.696
PMTB	5.836.516	5.735.028	5.774.052
Perubahan Inventori	12.193	13.666	12.716
Ekspor Neto	2.449.293	2.322.236	2.662.951
PDRB	11.628.631	11.547.044	11.979.799

Lanjutan Lampiran 7

Komponen Pengeluaran	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	2.259.806	2.393.359
Konsumsi LNPRT	87.247	96.436
Konsumsi Pemerintah	1.258.985	1.371.395
PMTB	5.937.963	6.484.529
Perubahan Inventori	12.914	13.204
Ekspor Neto	3.042.523	2.819.568
PDRB	12.599.438	13.178.492

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 8 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	18,83	18,66	17,98	16,24	16,85
Konsumsi LNPRT	0,72	0,75	0,70	0,64	0,70
Konsumsi Pemerintah	11,57	12,56	11,59	9,95	10,71
PMTB	55,31	54,28	51,33	45,96	49,71
Perubahan Inventori	0,13	0,14	0,13	0,12	0,11
Ekspor Neto	13,44	13,61	18,26	27,09	21,91
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	5,78	-0,38	3,14	4,14	5,91
Konsumsi LNPRT	10,37	5,60	-0,95	4,66	10,53
Konsumsi Pemerintah	4,76	13,09	-0,87	-1,39	8,93
PMTB	6,47	-1,74	0,68	2,84	9,20
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Neto	-	-	-	-	-
PDRB	4,70	-0,70	3,75	5,17	4,60

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 10 Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Bulungan (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	1,04	-0,07	0,57	0,75	1,06
Konsumsi LNPRT	0,07	0,04	-0,01	0,03	0,07
Konsumsi Pemerintah	0,47	1,28	-0,10	-0,15	0,89
PMTB	3,19	-0,87	0,34	1,37	4,34
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Neto	-	-	-	-	-
PDRB	4,70	-0,70	3,75	5,17	4,60

Sumber: Badan Pusat Statistik

MERUDUNG PEBATUN DE BENUANTA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BULUNGAN**
JL. JELARAI RAYA, TANJUNG SELOR
TELP (0552) 21008